

Peran Lembaga Keuangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Muharajabdinul¹, Abdul Latif^{2*}, Ahmad Roziqin³, Mushfirah Arif⁴, Aznal Huyo⁵

¹Universitas Fajar; Jl. Prof. Abdurahman Basalamah No.101, Kota Makassar

^{2*,3,4,5}IAIN Sultan Amai Gorontalo; Jl. Gelatik No. 1 Kota Gorontalo, 822725-821942

e-mail: ^{2*}abdullatif1003@gmail.com

Abstract: *This This research examines the role of financial institutions, both banks and non-banks, in improving people's welfare in Indonesia. This research uses a qualitative type of research method using a literature study approach. This study investigates the crucial functions of financial institutions such as fund mobilization, funding allocation, asset transfer, liquidity provision, income relocation, and poverty reduction. In particular, the majority of people do not know about non-bank financial institutions and cannot access them. This suggests that there is still an imbalance in how money and profits are distributed in society. The findings of this study show that financial institutions play an important role in promoting financial inclusion, especially for low-income people and micro, small and medium enterprises (MSMEs). Factors driving the increased role of financial institutions include the growth in income of middle-class families and individuals, changes in industry and technology, the ability of small savers to access financial instruments, operational efficiencies gained by financial institutions by pooling resources, helping to reduce liquidity costs and the need for more inclusive financial services.*

Keywords: *Financial Institutions, Community Welfare, Financial Services, Financial Literacy*

Abstrak: *Penelitian ini mengkaji peran lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Studi ini menyelidiki fungsi-fungsi krusial lembaga keuangan seperti mobilisasi dana, alokasi pendanaan, transfer aset, penyediaan likuiditas, relokasi pendapatan, dan penanggulangan kemiskinan. Secara khusus, mayoritas orang tidak tahu tentang lembaga keuangan non-bank dan tidak dapat mengaksesnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketidakseimbangan dalam bagaimana uang dan keuntungan didistribusikan di masyarakat. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Faktor-faktor yang mendorong peningkatan peran lembaga keuangan meliputi pertumbuhan pendapatan keluarga dan individu kelas menengah, perubahan dalam industri dan teknologi, kemampuan penabung kecil dalam mengakses instrumen keuangan, Efisiensi operasional yang diperoleh lembaga keuangan dengan mengumpulkan banyak sumber daya, membantu mengurangi biaya likuiditas serta kebutuhan akan layanan keuangan yang lebih inklusif.*

Kata Kunci: Lembaga Keuangan, Kesejahteraan Masyarakat, Layanan Keuangan, Literasi Keuangan

1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi di Indonesia menghadapi perubahan signifikan dari masa ke masa, ditandai dengan berbagai pemikiran ekonomi yang ditawarkan. Perubahan ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang turut mempengaruhi perekonomian domestik. Selain itu, krisis keuangan global yang terjadi hingga akhir tahun 90-an, yang dikenal sebagai krisis moneter,

memperparah keadaan. Krisis ini berdampak pada modifikasi struktur sosial dan ekonomi masyarakat, seperti anjloknya nilai tukar rupiah, melonjaknya harga-harga barang, dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Setelah terjebak dalam krisis ekonomi tahun 1998, Indonesia telah mengalami kemajuan besar dalam sektor keuangan selama tahun 2000-an. Jumlah dana yang berhasil diserap dan disalurkan kembali ke masyarakat terus meningkat seiring dengan peningkatan kualitas dan layanan yang diberikan. Ini berdampak pada peningkatan jumlah dana, jumlah pelanggan, dan variasi produk atau layanan yang ditawarkan kepada masyarakat (Kasmir, 2014). Di Indonesia, pertumbuhan lembaga keuangan non-bank telah mengalami banyak kemajuan di berbagai sektor, seperti layanan asuransi, simpanan dan investasi, kredit, serta bentuk lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan perbankan. Lembaga keuangan bukan bank adalah institusi atau badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dan secara tidak langsung menghimpunkan dana dari masyarakat untuk kemudian diberikan kembali kepada pihak yang memerlukan untuk kegiatan yang produktif.

Lembaga keuangan memiliki peran sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Institusi ini berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang memiliki sumber daya keuangan dan pihak yang membutuhkannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan bisnis. Lembaga keuangan dimulai dengan kemampuan mereka untuk mengumpulkan dana dari masyarakat melalui berbagai produk simpanan, yang merupakan bagian penting dari pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, dana yang dikumpulkan diputar kembali ke dalam sistem ekonomi melalui penyediaan pembiayaan dan kredit kepada berbagai sektor usaha. Dalam proses ini, uang yang pada awalnya tidak digunakan atau tidak produktif dapat digunakan untuk menggerakkan ekonomi melalui efek multiplier yang signifikan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan di artikan sebagai badan atau lembaga yang beroperasi di sektor keuangan, yang tugas utamanya adalah mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada masyarakat tertentu untuk mendanai investasi perusahaan. Walaupun peraturan tersebut memprioritaskan investasi lembaga keuangan, itu tidak berarti bahwa perusahaan dibatasi.

Faktanya, operasi pembiayaan lembaga keuangan dapat digunakan untuk investasi dalam bisnis, konsumsi, dan penjualan barang dan jasa. Secara umum, lembaga keuangan terbagi menjadi dua kategori: bank dan bukan bank. Yang membedakan antara kedua kategori ini adalah cara mereka menghimpun dana. Bank dapat mengumpulkan dana dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, sementara lembaga keuangan bukan bank hanya bisa mengumpulkan dana secara tidak langsung dari masyarakat. Mengenai penyaluran dana, tidak terdapat perbedaan yang substansial antara bank dan lembaga keuangan bukan bank. Meskipun demikian, ini bukan berarti jika lembaga keuangan bukan bank dilarang memberikan dana untuk investasi atau modal kerja. Selama bertahun-tahun, pemberian dana oleh lembaga keuangan bukan bank untuk investasi dan modal kerja telah dilakukan secara intensif. Oleh karena itu, lembaga keuangan bukan bank tetap diperbolehkan memberikan dana untuk tujuan tersebut.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana lembaga keuangan telah berhasil menjangkau dan melayani berbagai lapisan masyarakat, serta menganalisis efektivitas program dan layanan yang ditawarkan dalam mendorong perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.

Tulisan ini akan menyelidiki peran lembaga keuangan dalam menyediakan akses layanan keuangan yang inklusif bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang terlayani. Dengan menganalisis praktik terbaik dan penelitian terbaru, tulisan ini akan menekankan bagaimana lembaga keuangan dapat berkontribusi dalam mempromosikan akses yang adil terhadap layanan keuangan, serta bagaimana hal itu berdampak pada konsumsi, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini akan menyarankan kebijakan dan pendekatan yang dapat diadopsi oleh para pemangku kepentingan untuk memperkuat peran lembaga keuangan untuk supaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh dan berkelanjutan.

2. Kajian Pustaka

2.1 Lembaga Keuangan

Menurut Kasmir (2014:5) lembaga keuangan adalah entitas perusahaan yang beroperasi di sektor keuangan, di mana aktivitas yang dilakukan dapat mencakup hanya pengumpulan dana atau pemberian pinjaman (kredit), serta usaha untuk menggabungkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Daripada itu, bank lain juga menyediakan layanan keuangan yang mendukung dan memfasilitasi kegiatan pemberian pinjaman dengan cara mengumpulkan dana. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 yang disahkan pada tanggal 10 November 1998 mengenai perbankan, BANK diartikan sebagai "badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk meningkatkan kesejahteraan hidup banyak orang."

Secara umum, lembaga keuangan ataupun industri keuangan terbagi menjadi dua jenis, yaitu keuangan syariah dan keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang dalam kegiatannya, baik dalam penimbunan dana ataupun penyalurannya, memberikan dan mengenakan imbalan berdasarkan prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil (Kasmir, 2012). Sementara itu, lembaga keuangan konvensional adalah badan usaha yang pendapatannya terutama berupa aset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan dengan aset bukan finansial atau aset riil. Lembaga keuangan konvensional memberikan pinjaman kepada nasabah dan mengalokasikan dananya dalam bentuk obligasi. Selain daripada itu, mereka menyediakan berbagai layanan keuangan seperti skema tabungan, asuransi perlindungan, program pensiun, sistem pembayaran, dan transfer dana. Secara keseluruhan, lembaga keuangan konvensional merupakan bagian dari sistem ekonomi dan keuangan dalam ekonomi modern yang berperan dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi digital (Nurjaman, 2014).

Sebagai mayoritas penduduk Muslim, lembaga keuangan berbasis syariah harus aktif dalam menggerakkan ekonomi dan berperan lebih besar sebagai mediator dana dari orang kaya kepada yang miskin, sambil mempromosikan prinsip bisnis yang adil. Ini tidak hanya sebagai sumber keuangan berkelanjutan untuk meningkatkan penghasilan, tetapi juga untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui upaya dakwah ekonomi. Bank syariah perlu meningkatkan kedekatannya dengan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah. Tujuannya bukan hanya mencari keuntungan dan margin yang besar, tetapi juga membangun kepercayaan umat terhadapnya. Dengan demikian, masyarakat akan memberikan penaksiran positif yang dapat menginspirasi bank syariah untuk bertambah dan berkembang secara bersama dengan umat.

Fungsi dari lembaga keuangan yaitu (Subagyo, Sri Fatmawati dkk, 2000); 1) Memperlancar transaksi barang dan jasa dengan memakai uang dan instrumen kredit. 2) Mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan mengalokasikannya untuk perusahaan dalam bentuk pinjaman, dengan kata lain lembaga keuangan mengumpulkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan menyediakannya kepada pihak yang membutuhkan. 3) Memberikan analisis dan informasi ekonomi. 4) Untuk lembaga keuangan, analisis dan informasi ekonomi bermanfaat untuk memastikan keamanan dana yang dipinjamkan kepada nasabah, sehingga dapat mengurangi risiko kredit macet. 5) Menyediakan jaminan, yaitu

Lembaga keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral terkait keamanan dana masyarakat yang ditempatkan di lembaga tersebut. 6) Menciptakan dan menjamin likuiditas, hal ini terjadi karena lembaga keuangan memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan atau jatuh tempo.

2.2 Kesejahteraan Masyarakat

Menurut United Nations Development Program (UNDP), kesejahteraan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan pilihan yang tersedia dalam kehidupan, termasuk evaluasi terhadap "partisipasi dalam pengambilan keputusan publik". World Bank mendefinisikan kesejahteraan sebagai pengurangan tingkat kemiskinan. Pengukuran ini menggunakan batas kemiskinan PPP (Purchasing Power Parity) dalam US dollar perkapita perhari, yang mencerminkan daya beli mata uang suatu negara dalam membeli barang dan jasa yang setara di negara lain. Sebagai contoh, di Indonesia, seseorang dapat membeli beras seharga Rp. 9.000 per

liter, sedangkan di Amerika Serikat, harga satu liter beras yang setara adalah 1 US dollar. Dalam konteks nilai tukar PPP, pembelian beras seharga Rp. 9.000 di Indonesia dianggap setara dengan pengeluaran 1 US dollar, meskipun nilai tukar konvensional mungkin menunjukkan angka yang berbeda (misalnya, Rp. 14.000 per US dollar).

Kesejahteraan dan ide negara kesejahteraan merupakan tujuan utama bagi setiap individu, meskipun pengukurannya dapat bervariasi sesuai dengan pandangan, agama, dan doktrin yang mereka anut. Di arena internasional, indikator-indikator ini sering mencakup pendapatan per kapita, harapan hidup, dan tingkat pendidikan yang dicapai (E. Robert Goodin, (CIOS), 2015). Namun Dalam perspektif Islam, kebahagiaan tidak hanya berarti kekayaan, tetapi situasi yang dianggap ideal adalah saat terdapat keseimbangan antara aspek materi dan kebatinan yang diperoleh dari sumber daya yang tersedia (John J. Donohue dan Esposito, John. L, 1989).

Menurut Nabaan dan Sadalia (2013), financial behavior berkaitan dengan cara individu mengelola, menggunakan, dan merawat sumber daya keuangan yang dimilikinya. Individu yang menunjukkan sifat keuangan yang menanggung jawabakan umumnya berhasil dalam mengatur uang mereka, termasuk dalam hal membuat anggaran, menabung, menjaga pengeluaran, berinvestasi, dan memberi bayaran untuk tagihan tepat waktu. Menurut penelitian oleh Ida dan Dwinta (2014), perilaku keuangan berkaitan dengan tanggung jawab individu dalam mengelola keuangan mereka, yang mencakup cara mereka mengatur uang mereka. Tanggung jawab keuangan merujuk pada proses produktif dalam manajemen uang dan tahapan penggunaan aset keuangan secara efektif.

Inklusi keuangan melibatkan penyediaan layanan keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dan pembayaran dengan biaya yang terjangkau bagi semua lapisan ekonomi, terutama mereka yang berpendapatan yang rendah (Anwar dan Amri 2017). Bank Indonesia (2014) mengartikan keuangan inklusif sebagai semua usaha untuk menghapuskan rintangan baik yang berupa biaya maupun non-biaya, agar masyarakat dapat mengakses layanan jasa keuangan dengan lebih mudah. Indikator yang dapat digunakan sebagai tolak ukur keuangan inklusif suatu negara mencakup kesiapan atau aksesibilitas untuk mengukur kesanggupan menggunakan layanan keuangan formal dari segi jarak fisik dan biaya, penggunaan untuk menilai seberapa sering dan lama produk dan layanan keuangan digunakan (seperti kebiasaan, frekuensi, dan durasi penggunaan), kualitas untuk mengevaluasi sejauh mana produk dan layanan keuangan memenuhi kebutuhan pelanggan, serta kesejahteraan untuk menilai dampak layanan keuangan terhadap taraf hidup pengguna.

Tujuan untuk mencapai integrasi keuangan tersebut dapat dicapai dengan menerapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang telah dirancang oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 tahun 2016 mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), kebijakan ini mencakup tiang dan fondasi SNKI yang didukung oleh koordinasi antar kementerian/lembaga atau instansi terikat, serta integral dengan berbagai aksi untuk mencapai inklusi keuangan. Berikut adalah pilar-pilar dan fondasi dari SNKI: Pendidikan keuangan, Hak kepemilikan masyarakat, Fasilitas perantara dan jaringan distribusi keuangan, Layanan keuangan di sektor pemerintah, Perlindungan konsumen, serta Organisasi dan mekanisme implementasi yang efisien.

Menurut OJK (2016), pengukuran inklusi keuangan mencakup beberapa indikator, termasuk: 1) Ketersediaan atau akses, yang mengevaluasi kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal dari segi jangkauan fisik dan harga. 2) Penggunaan, yang menilai seberapa sering dan seberapa lama produk dan layanan keuangan digunakan, serta tingkat keteraturannya. 3) Kualitas, yang mengukur sejauh mana produk dan layanan keuangan memenuhi kebutuhan pelanggan. 4) Kesejahteraan, yang mengevaluasi dampak layanan keuangan terhadap kualitas hidup pengguna layanan tersebut.

Dalam penelitian Kharchenko (2011) yang berjudul Literasi Keuangan di Ukraina, literasi keuangan didefinisikan sebagai kemampuan berhitung yang penting dan pemahaman konsep dasar ekonomi yang diperlukan untuk mengelola tabungan dan membuat keputusan pinjaman. Menurut Warsono (2010), setiap individu perlu mencapai kemandirian keuangan dengan keilmuan dan praktik yang sehat dalam mengatur keuangan pribadi mereka. Literasi keuangan dapat diinterpretasikan sebagai tingkat keilmuan dan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan pribadinya.

Memahami dan menerapkan konsep dasar ekonomi secara tepat tercermin dalam cara seseorang mengatur keuangan mereka. Dalam konteks pengetahuan keuangan, terdapat berbagai indikator yang relevan. Beberapa komponen kunci dari kemampuan dan pengetahuan keuangan, seperti yang dikemukakan oleh Latifiana (2010), meliputi pemahaman dasar tentang pengorganisasian keuangan, manajemen kredit, pengendalian tabungan dan investasi, serta pengendalian risiko.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Menurut Habsy (2017) studi literatur merupakan suatu rangkuman tertulis yang mencakup artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang mendefinisikan teori dan menyediakan informasi mengenai masa lalu dan masa kini untuk diorganisasikan berdasarkan topik dan dokumen yang diperlukan. Jenis spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Artinya, konsep dan teori ekonomi yang relevan dibahas secara menyeluruh dan sistematis, dan kemudian dilakukan analisis bagaimana masalah tersebut dapat diselesaikan. Subjek penelitian ini adalah peran lembaga keuangan mikro dalam pertumbuhan ekonomi usaha kecil menengah. Data yang diperoleh dari penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan data yang relevan.

3.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini melibatkan analisis diskriptif fenomena dan uraian sajian. Hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan peran lembaga keuangan mikro dalam membangun usaha kecil menengah. Fokus penelitian ini adalah pada penelitian normatif yang akan menginterpretasikan prinsip hukum perseteruan usaha korporasi yang ada atau sementara berkembang, di karenakan prinsip-prinsip hukum dianggap sebagai acuan dalam undang-undang, lebih-lebih di pada pasal-pasal yang tercantum dasar hukum. Selanjutnya, penelitian ini mengeksplorasi isu-isu saat ini dengan menggunakan konsep-konsep hukum yang didukung oleh berbagai literatur yang relevan dengan topik ini.

4. Hasil dan Pembahasan

Lembaga keuangan, baik itu bank maupun bukan bank, berperan fundamental dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat. Namun, beberapa bagian masyarakat belum memiliki akses ke layanan tersebut. Secara khusus, mayoritas orang tidak tahu tentang lembaga keuangan non-bank dan tidak dapat mengaksesnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketidakseimbangan dalam bagaimana uang dan keuntungan didistribusikan di masyarakat. Maka, Sangat fundamental untuk selalu mendorong inklusi keuangan dan mendorong kesempatan jalan masuk ke lembaga keuangan bagi semua kelompok masyarakat. Peran pemerintah dan lembaga terkait dalam mewujudkan lingkungan yang aman serta meningkatkan ketersediaan lembaga keuangan sangatlah vital. Di samping itu, kesejahteraan ekonomi bisa terwujud dan semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari lembaga keuangan, baik bank walaupun bukan bank.

Kesejahteraan lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank menggenggam peranan krusial terhadap ekonomi suatu Negara. Keberadaan dasar kesejahteraan ini sangat penting karena dapat menentukan kebebasan sektor keuangan bagi semua pihak yang terlibat, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada masyarakat jika tidak terpenuhi. Terdapat pengakuan bahwa tidak semua segmen masyarakat dapat mengakses layanan keuangan yang diberikan oleh badan keuangan, terutama bukan bank, yang sering kali mempunyai dependensi dalam hubungannya dengan sebagian besar orang. Kesejahteraan lembaga keuangan, dalam konteks ekonomi, merupakan prinsip fundamental yang membentuk pondasi ekonomi suatu negara.

4.1 Peran Lembaga Keuangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Lembaga keuangan, tergolong bank dan lembaga bukan bank, memiliki kewajiban krusial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban ini mencakup mengumpulkan dana dari masyarakat, menyediakan biaya untuk masyarakat, memindahkan aktiva dan likuiditas, mengalokasikan kembali pendapatan, serta membantu mengatasi masalah kemiskinan. Untuk memahami lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi ini, akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) Mobilisasi Dana Kepada Masyarakat

Perbankan dan bisnis non-bank mengumpulkan dana dari masyarakat melalui berbagai mekanisme seperti kas, deposito, dan instrumen pendanaan lain sebagainya. Hal ini memungkinkan perseorangan untuk menabung dan menanamkan uang mereka dengan tenang dan tentram. Bank dan lembaga keuangan lain memiliki kemampuan untuk mendapatkan dana baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebaliknya, bisnis bukan bank cuma dapat menghimpun dana dengan cara bukan langsung, utamanya melewati publikasi surat berharga ataupun saham, serta melewati investasi, pinjaman, atau kredit dari lembaga keuangan lainnya. Dana dapat diperoleh secara langsung melalui deposito, rekening tabungan, rekening giro, atau dengan menerbitkan surat berharga atau saham untuk masyarakat.

Contoh konkret mobilisasi dana kepada masyarakat adalah melalui produk tabungan adalah program SimPel (Simpanan Pelajar) yang diinisiasi OJK dan diimplementasikan oleh berbagai bank. Program ini berhasil menjangkau lebih dari 1,5 juta pelajar dengan total dana yang terhimpun mencapai Rp 1,2 triliun pada tahun 2023. Hal ini membuktikan efektivitas program tabungan yang ditargetkan untuk segmen spesifik.

b) Alokasi pendanaan untuk umum

Bank yaitu institusi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan sumber daya untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi. Mereka menyediakan pembiayaan untuk berbagai jenis entitas bisnis seperti koperasi, kemitraan, perusahaan terbatas, perusahaan milik negara, dan entitas lainnya. Selain itu, bank juga memberikan pinjaman kepada individu untuk berbagai keperluan jangka pendek, menengah, dan panjang dalam masyarakat.

Lembaga keuangan non-bank juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam menyediakan sumber dana kepada masyarakat guna mencapai kesetaraan sosial. Mereka mampu menyediakan pendanaan kepada perusahaan dan individu di masyarakat tanpa harus berstatus sebagai bank. Biasanya, lembaga keuangan non-bank mengalokasikan dana untuk investasi, yang umumnya dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam jangka waktu sedang dan panjang.

Seperti di sektor perbankan, Bank BRI sebagai contoh telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 532 triliun kepada 34,5 juta debitur UMKM hingga akhir 2023. Program ini membantu pelaku usaha mikro mengembangkan bisnis mereka dengan bunga yang terjangkau.

c) Transfer aset

Lembaga keuangan memberikan "janji untuk membayar" untuk pihak yang lainnya, yaitu pinjaman dengan berbagai jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan peminjam. Investasi tersebut didanai institusi keuangan pada dasarnya hanya bisa memindahkan atau membagikan kewajiban peminjam mereka untuk aset yang jatuh tempo sesuai keinginannya. Tidak seperti peminjam yang harus mencari dan bertransaksi secara langsung, lembaga keuangan memberikan bantuan dengan menyediakan pinjaman dari penyimpanan dana untuk pengutang yang tidak dikenal dengan biaya transaksi dan informasi yang lebih murah. Konversi aset adalah proses pengalihan aset menjadi liabilitas.

Pentransferan kepemilikan atau mengubah kepemilikan aset dari satu substansi atau individu kepada substansi atau individu lain. Lain dikenal sebagai transfer aset. Hal ini bisa mencakup pemindahan kekayaan dalam berbagai bentuk, seperti uang kontan (Tunai), aset properti, investasi, saham, atau hak atas kekayaan intelektual. Hal ini bisa terjadi dalam banyak situasi yang berbeda, seperti bisnis, hukum, dan keuangan adalah beberapa bidang di mana transfer aset umumnya terjadi. Beberapa contoh konkret dari proses ini termasuk adalah bisnis, properti, keuangan, dan hak kekayaan intelektual.

d) Likuiditas

Kemahiran untuk memperoleh uang tunai dengan cepat pada saat diperlukan dikenal sebagai likuiditas. Bank memberi orang likuiditas dengan rekening, kartu debit, dan layanan pengecekan. Ini membantu kegiatan ekonomi dan memudahkan transaksi keuangan sehari-hari. Lembaga keuangan non-bank membutuhkan likuiditas yang cukup Untuk menjalankan dengan baik dan memberikan pelayanan keuangan yang dapat diandalkan kepada masyarakat. Akses keuangan yang stabil, pengurangan ketidakpastian keuangan, pengurangan risiko sistemik, dan dukungan

untuk pertumbuhan ekonomi adalah beberapa cara likuiditas yang memadai meningkatkan kesehatan masyarakat.

e) Relokasi Pendapatan

Banyak orang dengan penghasilan yang cukup menyadari bahwa pendapatan mereka akan berkurang secara signifikan ketika mereka pensiun. Mereka terus mengalokasikan pendapatan mereka untuk menyiapkan masa depan, lebih suka menginvestasikan atau menyimpan dalam aset fisik seperti tanah atau rumah. Namun, mereka juga menganggap produk keuangan dari lembaga keuangan, seperti tabungan, deposito, program pensiun, asuransi, atau saham, sebagai alternatif yang lebih menguntungkan dari pada pilihan awal. Meskipun mengalihkan sumber daya keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tindakan ini harus dipertimbangkan secara matang. Lembaga nonbank dapat memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang terjangkau kepada mereka yang membutuhkan, membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan kesempatan kepada individu maupun kelompok yang dapat terjadi tidak mempunyai akses untuk modal untuk memulai bisnis atau meningkatkan situasi ekonomi mereka.

Ada kemungkinan bahwa pendapatan yang dihasilkan Dana dari lembaga keuangan bukan bank akan dipakai sebagai mendorong inisiatif sosial yang memiliki tujuan untuk meunjang individu masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Ini termasuk mendukung program-program seperti pemberdayaan ekonomi, perbaikan kesehatan, peningkatan pendidikan, dan upaya mengentaskan kemiskinan. Dengan cara mendorong inisiatif ini, lembaga keuangan bukan bank ikut ambil alih dalam upaya untuk meminimalisir kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Selain itu, mereka juga dapat mengalokasikan pendapatan mereka untuk berinvestasi dalam proyek yang berkelanjutan dan memperhatikan lingkungan, seperti energi terbarukan, inisiatif lingkungan, atau usaha sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui langkah-langkah ini, lembaga keuangan bukan bank dapat berperan untuk mencapai tujuan yaitu pembangunan yang berkelanjutan yang menghasilkan dampak positif bagi seluruh masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.

f) Penanggulangan Kemiskinan

Di Indonesia, masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial masih menjadi isu yang signifikan, terutama di wilayah pedesaan. Masalah ini berpotensi menjadi sumber konflik, sehingga perlu dicari solusi alternatif untuk mengatasi kemiskinan. Kemiskinan merujuk pada kondisi di mana seseorang tidak mampu melengkapi kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Pemberdayaan, seperti melalui pengembangan kewirausahaan dan lingkungan, merupakan salah satu strategi untuk melawan kemiskinan. Meningkatkan dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan yang dinamis memungkinkan mereka untuk mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Peningkatan dalam kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan manusia yang berbudaya dan demokratis adalah tujuan dari program pemberdayaan ini, yang dirancang sebagai program terpadu yang komprehensif. Tujuannya adalah untuk mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Milenium dalam mengurangi kemiskinan.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dianggap sebagai alat pembangunan yang efektif dalam mendukung mengurangi kemiskinan. Hal ini karena LKM membolehkan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk mengakses peluang ekonomi yang sebelumnya sulit dijangkau. Selain itu, bagi usaha kecil dan mikro, LKM juga membantu dalam menyediakan modal usaha. Khususnya di daerah di mana akses ke lembaga perbankan konvensional terbatas, LKM memainkan peran penting dalam menyediakan sumber pembiayaan yang diperlukan. Sejak ikrar Summit Microcredit di Washington DC pada tahun 1997, peran kredit mikro dalam mendatangkan lapangan kerja mandiri dan mengurangi kemiskinan telah semakin diakui secara global. Usaha kecil dan mikro seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh modal dari bank-bank formal, sehingga mereka bergantung pada sumber-sumber pembiayaan informal seperti rentenir, unit simpan pinjam, koperasi, dan bentuk lainnya yang beragam.

Usaha kecil dan mikro seringkali tidak memiliki aset yang lengkap sebagai tanggungan atau catatan pembukuan bisnis yang lengkap, hal ini merupakan syarat umum di lembaga perbankan. Selain itu, kebutuhan dana mereka cenderung kecil. Karena kondisi seperti itu, mereka kesulitan

mendapatkan permodalan dari bank-bank resmi. Namun, lembaga keuangan mikro (LKM) dapat membantu mengatasi hambatan ini dengan menawarkan kredit yang lebih fleksibel, sehingga memungkinkan usaha kecil dan mikro untuk mendapatkan akses permodalan yang mereka butuhkan.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menunjukkan tingkat fleksibilitas yang tinggi dan sering kali cocok dengan baik dalam konteksnya. LKM mampu mendukung masyarakat kecil, termasuk usaha mikro dan kecil, dengan cara berikut:

- 1) menyediakan berbagai layanan keuangan yang sesuai atau relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat;
- 2) membantu kelompok berpenghasilan rendah;
- 3) menggunakan prosedur serta mekanisme yang mudah disesuaikan dengan kebutuhan lokal untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin.

Kemampuan lembaga keuangan mikro menunjukkan peran strategisnya yang sangat vital dalam menghadapi situasi nyata usaha mikro dan kecil. LKM dapat mengalokasikan dana dengan kualifikasi administratif yang dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi usaha mikro dan kecil. Hal ini menyatakan pentingnya peran lembaga keuangan mikro dalam mendorong pertumbuhan dan peningkatan usaha kecil dan mikro.

Lembaga keuangan, walaupun itu perbankan maupun non-perbankan, dapat lebih diperkuat dalam situasi ini. Namun juga penting untuk diingat bahwa mencapai distribusi keadilan sosial yaitu tantangan yang sangat rumit yang membutuhkan kerja sama antara sektor antara pemerintah, lembaga keuangan, dan seluruh warga Masyarakat.

Oleh karena itu, lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara di pasar keuangan dan menyediakan berbagai layanan untuk mempermudah transaksi moneter. Selain dari pada itu, baik bank maupun lembaga keuangan lainnya memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka memfasilitasi mekanisme pemenuhan antara penyelenggara ekonomi sebagai hasil dari transaksi yang dilakukan. Sebagai contoh, Bank Sentral mencetak uang rupiah untuk mempermudah transaksi antara pihak yang terlibat. Selain dari pada itu, lembaga keuangan memainkan peran dalam menyediakan sarana untuk mentransfer dana dari bagian yang memiliki sumber daya ke bagian yang membutuhkan (peran intermediasi). Contohnya, mereka dapat bertindak sebagai pialang, dealer, atau broker dalam berbagai aset, yang membantu efisiensi kerja kedua belah pihak. Terakhir, lembaga keuangan juga berperan dalam mengurangi risiko yang timbul.

4.2 Faktor yang Mendorong Peningkatan Peran Lembaga Keuangan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Di Indonesia, lembaga keuangan, termasuk bank dan non-bank, mengalami sedikit perkembangan. Namun, dalam sepuluh tahun terakhir, peran lembaga keuangan ini telah mengalami peningkatan yang signifikan. Beberapa faktor telah mendorong peningkatan ini:

1. Pendapatan keluarga dan individu di kelas menengah yang stabil telah mendorong kebiasaan menabung secara signifikan setiap tahun. Institusi keuangan menyediakan opsi menabung yang menguntungkan.

Pendapatan keluarga dan individu di kelas menengah yang stabil memiliki peran penting dalam mendorong kebiasaan menabung, yang pada gilirannya memperkuat peran lembaga keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika pendapatan stabil, keluarga di kelas menengah cenderung memiliki sisa pendapatan setelah memenuhi kebutuhan dasar. Kelebihan ini sering kali disalurkan dalam bentuk tabungan untuk memenuhi kebutuhan masa depan seperti pendidikan, kesehatan, atau investasi.

Dengan meningkatnya kebiasaan menabung, lembaga keuangan mendapatkan dana yang cukup untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat. Individu atau usaha kecil dan menengah (UKM) dapat menggunakan kredit ini untuk memenuhi kebutuhan produktif seperti memulai bisnis baru, membeli peralatan, atau meningkatkan kapasitas produksi mereka. Jadi, menabung tidak hanya membantu orang yang menabung, tetapi juga membantu kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

2. Perubahan dalam industri dan teknologi sudah menyatakan jika lembaga keuangan dapat melengkapi semua keinginan modal dan dana untuk sektor industri yang umumnya dibiayai oleh para penabung.
Seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan modal dalam sektor industri menjadi semakin kompleks dan spesifik. Perusahaan membutuhkan akses ke dana yang besar untuk mengadopsi teknologi baru, seperti otomatisasi, kecerdasan buatan, atau energi terbarukan, yang sering kali memerlukan investasi awal yang substansial. Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam hal ini. Mereka berfungsi sebagai perantara antara individu yang menabung dan sektor bisnis yang membutuhkan modal.
Lembaga keuangan mengelola dana yang dikumpulkan dari tabungan, deposito, atau investasi dan diberikan ke sektor industri dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Hal ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup orang dan membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan menghubungkan dana penabung ke sektor produktif.
3. Penabung kecil kesulitan mengakses instrumen keuangan yang memiliki denominasi besar. Karena denominasi tersebut sangat besar, penabung kecil tidak bisa mengakses atau mendapatkan pinjaman pasar uang. Namun, lembaga keuangan dapat menyerahkan jangka bagi penabung kecil untuk mengakses instrumen keuangan tersebut dengan mengumpulkan dana dari banyak penabung.
Kemampuan penabung kecil untuk mengakses instrumen keuangan ini turut mendukung pertumbuhan ekonomi. Dana yang terkumpul melalui lembaga keuangan digunakan untuk membiayai proyek-proyek besar, seperti pembangunan infrastruktur atau ekspansi bisnis korporasi, yang menciptakan lapangan kerja dan mendorong aktivitas ekonomi. Pada akhirnya, keuntungan dari proyek-proyek ini tidak hanya dirasakan oleh penabung kecil dalam bentuk imbal hasil, tetapi juga oleh masyarakat luas melalui peningkatan akses terhadap layanan publik dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Peran lembaga keuangan ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berfungsi sebagai perantara dana, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kecil.
4. Dengan mengumpulkan banyak sumber untuk menghasilkan berbagai layanan keuangan dalam jumlah besar, biaya per unit layanan dapat diminimalkan seoptimal kemungkinan. Hal ini akan memberikan lembaga keuangan keunggulan bersaing dibandingkan dengan pesaing lain yang memberikan layanan serupa.
Lembaga keuangan dapat menurunkan harga barang dan jasa keuangan, seperti pinjaman, tabungan, dan asuransi, sehingga memungkinkan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mendapatkan pembiayaan dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini penting karena UKM memainkan peran penting dalam perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia, yang menghasilkan lebih banyak uang daripada negara lain.
5. Lembaga keuangan membantu mengurangi biaya likuiditas bagi klien dengan menyediakan layanan likuiditas khusus. Ketidakpastian dalam aliran kas bisnis dan perorangan dapat mengancam kestabilan mereka jika mereka tidak memiliki cukup likuiditas saat dibutuhkan, yang bisa berakibat pada denda. Untuk mengatasi masalah ini, lembaga keuangan menawarkan solusi seperti deposito untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut.
Bagi individu, layanan seperti rekening tabungan dan deposito memungkinkan mereka menyimpan dana untuk kebutuhan mendesak, seperti biaya medis atau perbaikan mendadak, tanpa harus mengambil utang dengan bunga tinggi. Selain itu, lembaga keuangan menawarkan alat manajemen keuangan, seperti aplikasi digital, untuk membantu klien memantau dan merencanakan arus kas mereka dengan lebih efektif.
Dampak positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat sangat besar. Dengan akses ke likuiditas yang mudah, individu dapat menghadapi keadaan darurat tanpa merusak stabilitas keuangan mereka, sementara bisnis dapat terus beroperasi tanpa gangguan meskipun menghadapi fluktuasi pendapatan. Hal ini menciptakan rasa aman finansial, yang merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup dan produktivitas.

6. Strategi untuk mengurangi kemiskinan tidak bisa lagi hanya difokuskan pada aspek ekonomi saja. Kini, pendekatan yang diperlukan adalah analisis menyeluruh kepada semua faktor yang menimbulkan kemiskinan di tingkat lokal, dengan mempertimbangkan berbagai dimensi yang terlibat. Untuk menggapai tujuan penurunan kemiskinan, KPK telah memutuskan strategi pemberdayaan masyarakat melalui dua pendekatan, yaitu:

- a) Mengurangi beban biaya hidup bagi kelompok miskin.
- b) Meningkatkan produktivitas masyarakat miskin untuk meningkatkan penghasilan mereka, dengan fokus pada pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini mencakup peningkatan program, pendanaan, dan pendampingan untuk mempersiapkan, melindungi, dan meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat serta kelembagaannya, agar pendanaan yang dialokasikan dapat terserap dan dimanfaatkan secara efektif. Selain itu, meningkatkan jumlah institusi keuangan mikro di daerah sebagai sarana untuk mendukung modal usaha masyarakat dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

5. Kesimpulan

Berlandaskan pembahasan di atas peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran lembaga keuangan mencakup berbagai jenis entitas, termasuk lembaga keuangan bank semacam bank sentral, bank umum konvensional, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat konvensional, dan bank perkreditan rakyat syariah. Kemudian juga meliputi lembaga keuangan bukan bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, koperasi, pasar modal atau bursa efek, perusahaan factoring, modal ventura, dan pegadaian, leasing, perusahaan kartu kredit, pasar uang, pembiayaan infrastruktur, dan pembiayaan konsumen). Menghimpun dana masyarakat; Menyalurkan dana masyarakat; Pengalihan aset (assets transmutation); Likuiditas (liquidity); Alokasi pendapatan (income allocation); transaksi atau transaction. Disamping itu peran lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang sangat penting dalam memberikan distribusi keadilan kepada masyarakat antara lain : Lembaga keuangan memiliki beberapa peran krusial dalam ekonomi. Pertama, mereka memfasilitasi transaksi antar pelaku ekonomi, memainkan peran transmisi dalam mekanisme pembayaran. Kedua, lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai perantara dalam mengalirkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan ke pihak yang memerlukan dana, yang dikenal sebagai peran intermediasi. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab dalam mengelola risiko untuk melindungi dana nasabah. Namun, keberadaan lembaga keuangan tidak dapat dilepaskan dari kehadiran usaha mikro dan kecil (UMK). UMK sering kali tidak memiliki akses yang memadai ke lembaga keuangan formal, sehingga dianggap tidak dapat diakses. Namun, dalam realitasnya, UMK dan lembaga keuangan memiliki hubungan simbiotik yang kuat. Lembaga keuangan dapat memberikan dana dengan persyaratan administratif yang lebih elastis, yang sesuai dengan kondisi UMK. Ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pengembangan UMK.
2. Ada beberapa aspek yang mendorong lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan Bukan Bank untuk semakin berperan dalam memastikan pembegaian kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya pendapatan keluarga dan individu kelas menengah yang memungkinkan mereka untuk menabung sebagian dari pendapatannya setiap tahunnya. Selain itu, perkembangan industri dan teknologi yang pesat juga menjadi pendorong utama: Lembaga keuangan mempunyai kapasitas untuk melengkapi kebutuhan modal dan dana sektor industri yang umumnya besar, yang diperoleh dari para penabung. Namun, denominasi yang tinggi dari instrumen keuangan membuat sulit bagi penabung kecil untuk mendapatkan akses. Untuk mengatasi krisis kemiskinan, tidak cukup hanya menggunakan pendekatan ekonomi saja, tetapi memerlukan analisis menyeluruh terhadap semua faktor yang membawa dampak kemiskinan secara lokal. Untuk mencapai tujuan kemerosotan angka kemiskinan, KPK mengusulkan dua strategi pemberdayaan masyarakat, yaitu mengkacilkam beban pengeluaran konsumsi kelompok miskin dan menambah produktivitas mereka untuk menambahkan pendapatan.

Daftar Pustaka

- Anwar, Haeril, and Iain Parepare, 'Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Solusi Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)', 2 (2020)
- Barat, Tenggara, Sharia Microfinance, and West Nusa, 'Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bmt Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Nusa Tenggara Barat', 4.1 (2018), 78–92
- Budiono, Arief, and Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 'Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah', 2.1 (2017), 54–65
- Dan, Pembiayaan, Kredit Di, and Lembaga Keuangan, 'Pembiayaan Dan Kredit Di Lembaga Keuangan', 1.November (2018), 14–24
- Di, Kemiskinan, Provinsi Nusa, and Tenggara Barat, 'Stamboel, Kemal A. 2012. Panggilan Keberpihakan, Strategi Mengakhiri Di Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia Pusaka Utama.', 12.1 (2021)
- Factors, Socio-economic, 'Kondisi Sosial Ekonomi Dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga : Kasus Di Wilayah Pesisir Jawa Barat', 3.1 (2010), 1–10
- Fadilah, Nur, 'Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam', 1.1 (2020)
- Ilmiah, Jurnal, and Ekonomi Islam, 'Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pengusaha Mikro', 8.01 (2022), 430–36
- Habsy, Bakhrudin All. "Seni memahami penelitian kualitatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur." *Jurnal Konseling Andi Matappa* 1.2 (2017): 90-100
- 'Keadilan Distributif: Studi Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Di Jawa Tengah', 2015
- Keuangan, Lemabaga, Bank Konsep, and Fungsi Dan, 'Madani Syari'ah Vol. 1, Januari 2019', 1 (2019), 91–102
- Keuangan, Peran Lembaga, 'Pubuk Islam Daiam Pemberdayaan'
- Kholis, Nur, and Jaminan Sosial, 'Kesejahteraan Sosial Di Indonesia'
- Lembaga, Peran, Keuangan Bank, D A N Lembaga, and Jamal Wiwoho, 'Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat', 87–97
- Masyarakat, D A N Kesejahteraan, 'Sistem Ekonomi Islam'
- Mataram, Universitas, and Sharia Microfinance, 'Model Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengurai Kemiskinan Di Kota Mataram', 7.1 (2021), 82–105
- Mikro, Kecil D A N, 'Potensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Dalam Upaya Pengembangan Usaha', 229–38
- Muheramtohad, Singgih, 'Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia', 8.1 (2017), 65–77
- Oka, I Komang, and Artana Yasa, 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali', 2012
- Perbankan, Jurnal, and Keuangan Syariah Volume, 'Strategi Pengembangan Keuangan Syariah Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial-Ekonomi', 01 (2022)
- Prawiro, Atmo, and Ahmad Khoirul Fata, 'Volume 16 Nomor 1 , Juni 2020 Optimalisasi Peran Lembaga Zakat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial-Ekonomi', 16 (2020), 80–98
- Simatupang, H Bachtiar, Universitas Islam, and Sumatera Utara, 'Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian', 6.2 (2019), 136–46
- Syariah, Fakultas, and Universitas Islam, 'Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah', 2.1, 12–23
- Terhadap, Profitabilitas, Kinerja Bank, Ryan Afjune, Supriyanto Putra, Lelya Cahya Mufidati, Syawalia Aziza, and others, 'Analisis Keadilan Bank Dalam Bertransaksi : Hubungan Dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta , Indonesia 2024, 112–37
- Tinggi, Sekolah, Ilmu Hukum, and Lubuk Lintah, 'Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (' , 6 (2017), 387–402